KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fadli Zon: Korupsi Memperburuk Ketimpangan
Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

FADLI ZON: KORUPSI MEMPERBURUK KETIMPANGAN

KORUPSI merupakan penyebab utama ketimpangan sosial.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan anggota BKSAP Anthon Sihombing berfoto bersama dengan delegasi Inter Parliamentary Union (IPU).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi oleh Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, anggota BKSAP Anthon Sihombing, Ferry Kase dalam sidang tahunan Inter Parliamentary Union (IPU).

Isu ketimpangan tersebut menjadi topik utama yang dibahas dalam sidang tahunan Inter-Parliamentary Upion (IPU) ke-136 di Dhaka, Bangladesh, yang berlangsung pada 1-5 April 2017. Indonesia mengirimkan tujuh delegasi anggota parlemen ke sidang IPU kali ini, dipimpin oleh Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan. Sebagai anggota delegasi adalah Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Anthon Sihombing (Golkar), Irine Yusiana Roba Putri (PDI-P), Andi Irawan Darmawan Aras (Gerindra), dan Ferry Kase (Hanura).

Kini tantangan ketimpangan, menurut Fadli, memang semakin besar. Di Indonesia, misalnya, selain ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang indeksnya pernah mencapai 0,42 pada 2015, terdapat ketimpangan kepemilikan lahan. Menurut data BPS (2013), indeks gini tanah nasional mencapai angka 0,72. Sebagai gambaran konkret, sekitar 56 persen lahan yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh 2 persen kalangan elite. Bagi negara agraris seperti Indonesia, ketimpangan tersebut tentu saja berimplikasi buruk. Sebab, 62,75 persen penduduk miskin berasal dari perdesaan dan sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan, Indonesia telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan agar orang miskin bisa mendapatkan akses yang sama terhadap dua kebutuhan vital tersebut. Namun upaya menangani ketimpangan tak cukup dilakukan hanya dengan menangani efeknya, tapi juga harus dilakukan dengan menyasar faktor penyebabnya.

Secara struktural, Fadli mengatakan isu ketimpangan sebenarnya merupakan panggilan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, terutama melalui penerapan pajak progresif yang signifikan. Persis di situ diperlukan penyesuaian antara hukum perbankan dan perpajakan untuk memperkecil ruang gerak dan munculnya para pengemplang pajak. Sebab, pajak merupakan instrumen penting untuk melakukan redistribusi kemakmuran.

Dalam posisi sebagai pembuat undang-undang, pengawas pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, serta sebagai pengawas dan pengontrol anggaran, anggota parlemen memainkan peran penting dalam gerakan pemberantasan korupsi untuk mereduksi ketimpangan.

Di sela-sela jadwal sidang yang ketat, delegasi parlemen Indonesia memenuhi undangan *bilateral meeting* dari delegasi empat negara, yaitu Georgia, Thailand, Irak, dan Jepang. Keempat negara tersebut mengharapkan kerja sama internasional yang lebih erat, baik di antara sesama lembaga parlemen, maupun mewakili kepentingan diplomatik masing-masing negara.

Delegasi Georgia, misalnya, menyampaikan keinginannya untuk membentuk grup kerjasama parlemen dengan Indonesia. Sementara, delegasi parlemen Thailand sangat berharap bisa menjadi bagian penting dari GOPAC. Adapun delegasi Irak dan Jepang berharap agar kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan kedua negara bisa semakin erat. Irak, misalnya, menyampaikan harapan agar Indonesia bisa segera membuka penerbangan langsung Jakarta-Baghdad, mengingat situasi di Irak saat ini sudah lebih kondusif.

Selain pertemuan-pertemuan bilateral, selama di Dhaka rombongan delegasi parlemen Indonesia juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga Indonesia yang mukim di Bangladesh. Pertemuan difasilitasi oleh KBRI Dhaka. Selama di Dhaka pula, Ketua Delegasi Indonesia Dr. Fadli Zon mendapatkan undangan jamuan khusus dari pejabat tinggi negara Bangladesh, seperti undangan makan siang dari Menteri Luar Negeri Bangladesh H.E. Abu Hassan Mahmood Ali, serta undangan jamuan makan malam dari Presiden Bangladesh H.E. Abdul Hamid.

●INFORIAL